

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Jumlah Penduduk

a. Definisi Jumlah Penduduk

Lembaga BPS dalam Statistik Indonesia (2013) menjabarkan penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Sedangkan menurut Said (2012) yang dimaksud dengan penduduk adalah jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil dari proses-proses demografi yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi.

Reverend Thomas Maltus pada tahun 1798 (Arsyad, 2014) mengemukakan teorinya tentang hubungan pertumbuhan penduduk dengan pembangunan ekonomi. Dalam tulisannya konsep hasil yang menurun (*concept of dimishing return*). Maltus menjelaskan kecenderungan umum penduduk suatu negara untuk tumbuh menurut deret ukur yaitu dua-kali lipat setiap 30-40 tahun. Sementara itu saat yang sama, karena hasil yang menurun dari faktor produksi tanah, persediaan pangan hanya tumbuh menurut deret hitung. Oleh karena pertumbuhan persediaan pangan tidak bisa mengimbangi pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dan tinggi, maka pendapatan perkapita (dalam masyarakat tani didefinisikan sebagai produksi pangan perkapita) akan cenderung turun menjadi sangat rendah, yang menyebabkan

jumlah penduduk tidak pernah stabil, atau hanya sedikit diatas tingkat subsisten yaitu pendapatan yang hanya dapat untuk memenuhi kebutuhan sekedar untuk hidup.

Menurut Maier (Kuncoro, 2012): di kalangan para pakar pembangunan telah ada konsensus bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak hanya berdampak buruk terhadap supply bahan pangan, namun juga semakin membuat kendala bagi pengembangan tabungan, cadangan devisa, dan sumberdaya manusia.

Terdapat tiga alasan mengapa pertumbuhan penduduk yang tinggi akan memperlambat pembangunan, yaitu:

- 1) Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan dibutuhkan untuk membuat konsumsi dimasa mendatang semakin tinggi. Rendahnya sumberdaya perkapita akan menyebabkan penduduk tumbuh lebih cepat, yang gilirannya membuat investasi dalam “kualitas manusia” semakin sulit;
- 2) Banyak negara yang penduduknya masih sangat tergantung dengan sektor pertanian, pertumbuhan penduduk mengancam keseimbangan antara sumberdaya alam yang langka dan penduduk. Sebagian Karena pertumbuhan penduduk memperlambat perpindahan penduduk dari sektor pertanian yang rendah produktifitasnya ke sektor pertanian modern dan pekerjaan modern lainnya;
- 3) Pertumbuhan penduduk yang cepat membuat semakin sulit melakukan perubahan yang dibutuhkan untuk meningkatkan perubahan ekonomi dan sosial. Tingginya tingkat kelahiran merupakan penyumbang utama pertumbuhan kota yang cepat. Bermekarannya kota-kota di NSB

membawa masalah-masalah baru dalam menata maupun mempertahankan tingkat kesejahteraan warga kota.

Telaah lain menunjukkan bahwa penduduk memiliki dua peranan dalam pembangunan ekonomi; satu dari segi permintaan dan yang lain dari segi penawaran. Dari segi permintaan penduduk bertindak sebagai konsumen dan dari segi penawaran penduduk bertindak sebagai produsen. Oleh karena itu, perkembangan penduduk yang cepat tidaklah selalu merupakan penghambat bagi jalannya pembangunan ekonomi jika penduduk ini mempunyai kapasitas tinggi untuk menghasilkan dan menyerap hasil produksi yang dihasilkan. Ini berarti tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi disertai dengan tingkat penghasilan yang tinggi pula. Jadi pertumbuhan penduduk dengan tingkat penghasilan rendah tidak ada gunanya bagi pembangunan ekonomi. Disisi lain, alasan penduduk dipandang logis sebagai penghambat pembangunan, dikarenakan jumlah penduduk yang besar dan dengan pertumbuhan yang tinggi, dinilai hanya menambah beban pembangunan. Jumlah penduduk yang besar akan memperkecil pendapatan perkapita dan menimbulkan masalah ketenagakerjaan (Dumairy, 2016).

Bagi negara-negara berkembang keadaan perkembangan penduduk yang cepat justru akan menghambat perkembangan ekonomi. Karena akan selalu ada perlombaan antara tingkat perkembangan output dengan tingkat perkembangan penduduk, yang akhirnya akan dimenangkan oleh perkembangan penduduk. Jadi, karena penduduk juga berfungsi sebagai tenaga kerja, maka paling tidak terdapat kesulitan memperoleh kesempatan

kerja. Jika mereka tidak memperoleh pekerjaan atau menganggur, maka justru akan menekan standar hidup bangsanya menjadi lebih rendah.

Penduduk yang selalu berkembang menuntut adanya perkembangan ekonomi yang terus-menerus. Semua ini memerlukan lebih banyak investasi. Bagi negara berkembang, cepatnya perkembangan penduduk menjadi sebuah ganjalan dalam perkembangan ekonomi, karena negara-negara ini memiliki sedikit kapital.

Todaro (2014), menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja (yang terjadi beberapa tahun kemudian setelah pertumbuhan penduduk) secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jumlah angkatan kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti meningkatkan ukuran pasar domestiknya. Dengan kata lain, semakin banyak angkatan kerja yang digunakan dalam proses produksi maka output hasil produksi akan mengalami peningkatan sampai batas tertentu.

Meskipun terdapat pertentangan mengenai konsekuensi positif dan negatif yang ditimbulkan oleh tingginya laju pertumbuhan penduduk, namun selama beberapa dekade mulai muncul gagasan baru. Gagasan tersebut dikemukakan oleh Robert Cassen dalam Todaro (2014) sebagai berikut:

- 1) Persoalan kependudukan tidak semata-mata menyangkut jumlah akan tetapi juga meliputi kualitas hidup dan kesejahteraan materiil;
- 2) Pertumbuhan penduduk yang cepat memang mendorong timbulnya masalah keterbelakangan dan membuat prospek pembangunan menjadi

semakin jauh. Laju pertumbuhan penduduk yang terlampau cepat meskipun memang bukan merupakan penyebab utama dari keterbelakangan, harus disadari bahwa hal tersebut merupakan salah satu faktor penting penyebab keterbelakangan di banyak negara;

- 3) Pertumbuhan penduduk secara cepat menimbulkan berbagai konsekuensi ekonomi yang merugikan dan hal itu merupakan masalah yang utama harus dihadapi negara-negara Dunia Ketiga. Mereka kemudian mengatakan bahwa laju pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat mendorong timbulnya berbagai macam masalah ekonomi, sosial dan psikologis yang melatarbelakangi kondisi keterbelakangan yang menjerat negaranegara berkembang.

Melonjaknya beban pembiayaan atas anggaran pemerintah tersebut jelas akan mengurangi kemungkinan dan kemampuan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup generasi dan mendorong terjadinya transfer kemiskinan kepada generasi mendatang yang berasal dari keluarga berpenghasilan menengah ke bawah (Todaro, 2014).

Pertumbuhan penduduk juga menghalangi prospek tercapainya kehidupan yang lebih baik karena mengurangi tabungan rumah tangga dan juga negara. Di samping itu, jumlah penduduk yang terlampau besar akan menguras kas pemerintah yang sudah sangat terbatas untuk menyediakan berbagai pelayanan kesehatan, ekonomi dan sosial bagi generasi baru.

2. Pertumbuhan Ekonomi

a. Definisi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian. Kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan output nasional. Adanya perubahan output dalam perekonomian merupakan analisis ekonomi jangka pendek. Menurut Sukirno (2016) pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pembangunan Ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi ditambah dengan perubahan, artinya ada tidaknya pembangunan ekonomi dalam suatu Negara pada suatu tahun tertentu tidak saja diukur dari kenaikan produksi barang dan jasa yang berlaku dari tahun ke tahun, tetapi juga perlu diukur dari perubahan lainnya yang berlaku dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi seperti perkembangan pendidikan, perkembangan teknologi, peningkatan dalam kesehatan, peningkatan dalam infrastruktur yang tersedia.

Pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan produksi barang dan jasa secara nasional, sedang pembangunan berdimensi lebih luas. Salah satu sasaran pembangunan ekonomi daerah adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan. Laju pertumbuhan PDRB akan memperlihatkan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Penekanan pada "proses", karena

mengandung unsur dinamis, perubahan atau perkembangan. Oleh karena itu pemahaman indikator pertumbuhan ekonomi biasanya akan dilihat dalam kurun waktu tertentu, misalnya tahunan. Aspek tersebut relevan untuk dianalisa sehingga kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendorong aktivitas perekonomian domestik dapat dinilai efektifitasnya.

Menurut Scumpeter (2014) pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan jangka panjang secara perlahan dan mantap terjadi melalui kenaikan tabungan dan penduduk. Sedangkan menurut Djojohadikusumo dalam Sanusi (2004) pertumbuhan ekonomi berfokus pada proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Perkembangan ekonomi menurut mereka mengacu kepada permasalahan negara terbelakang, sedangkan pertumbuhan ekonomi mengacu kepada permasalahan negara maju.

b. Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Indikator pertumbuhan ekonomi sebagaimana teori yang dikemukakan Adisasmita (2014) ada beberapa indikator yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah sebagai berikut:

1) Ketidakseimbangan Pendapatan

Dalam keadaan yang ideal, di mana pendapatan dengan mutlak didistribusikan secara adil, 80 persen populasi terbawah akan menerima 80 persen dari total pendapatan, sedangkan 20 persen populasi teratas menerima 20 persen total pendapatan. Indikator ketidak seimbangan

pendapatan dapat diterapkan untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah.

2) Perubahan Struktur Perekonomian

Dalam masyarakat yang maju, pembangunan ekonomi yang dilaksanakan akan mengakibatkan perubahan struktur perekonomian, dimana terjadi kecendrungan bahwa kontribusi (peran) sektor pertanian terhadap nilai PDRB akan menurun, sedangkan kontribusi sektor industri akan meningkat. Sektor industri memiliki peranan sangat penting dalam pembangunan nasional dan regional, sektor industri dapat menyediakan lapangan kerja yang luas, memberikan peningkatan pendapatan kepada masyarakat, menghasilkan devisa yang dihasilkan dari ekspor.

3) Pertumbuhan Kesempatan Kerja

Masalah ketenagakerjaan dan kesempatan kerja merupakan salah satu masalah yang strategis dan sangat mendesak dalam pembangunan di Indonesia. Penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 240 jiwa, tingkat pengangguran cukup tinggi dan cenderung bertambah luas akibat krisis financial Negara-negara di dunia. Untuk mengatasi krisis ekonomi yang sangat luas tersebut, diperlukan peranan pemerintah.

4) Tingkat dan Penyebaran Kemudahan

Dalam hal ini “kemudahan” diartikan sebagai kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, baik pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari (seperti sandang, pangan, papan, memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan, kesempatan melakukan ibadah, rekreasi dan sebagainya), maupun pemenuhan kebutuhan untuk dapat

melakukan kegiatan usaha misalnya mendapatkan bahan baku, bahan penolong, suku cadang, listrik, air bersih, dan jasa-jasa seperti jasa angkutan, pemasaran, perbankan dan lainnya)

5) Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu konsep yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi regional (wilayah) adalah konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan ukuran prestasi (keberhasilan) ekonomi dari seluruh kegiatan ekonomi.

3. Upah Minimum Regional

Menurut pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum. Upah minimum adalah Upah Bulanan Terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menentukan bahwa Pemerintah dalam hal ini Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Propinsi dan/atau bupati/walikota, menetapkan upah minimum berdasarkan KHL dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan ketentuan mengenai penghasilan yang layak, kebijakan pengupahan, kebutuhan hidup layak dan perlindungan pengupahan, penetapan upah minimum dan pengenaan denda terhadap pekerja/buruh yang melakukan pelanggaran karena kesengajaan atau kelalaian diatur dengan peraturan pemerintah (Rusli, 2011).

Upah minimum diarahkan kepada pencapaian KHL yaitu setiap penetapan upah minimum harus disesuaikan dengan tahapan pencapaian perbandingan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak yang besarnya

ditetapkan Menaker (Menteri Tenaga Kerja). Pencapaian KHL perlu dilakukan secara bertahap karena kebutuhan hidup minimum yang sangat ditentukan oleh kemampuan dunia usaha (Rusli, 2011).

Upah minimum dapat terdiri atas:

- 1) Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
- 2) Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota (Rusli, 2011).

Upah minimum sektoral dapat ditetapkan untuk kelompok lapangan usaha beserta pembagiannya menurut klasifikasi lapangan usaha Indonesia untuk kabupaten/kota, provinsi, beberapa provinsi atau nasional, dan tidak boleh rendah dari upah minimum regional daerah yang bersangkutan.

Penetapan upah minimum perlu mempertimbangkan beberapa hal secara komprehensif. Dasar pertimbangan menurut Pasal 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER01/MEN/1999 sebagai berikut:

- 1) Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dengan mempertimbangkan:
 - a) Kebutuhan Hidup Minimum (KHM);
 - b) Indeks Harga Konsumen (IHK);
 - c) Kemampuan, perkembangan, dan kelangsungan perusahaan;
 - d) Upah pada umumnya yang berlaku di daerah tertentu dan antar daerah;
 - e) Kondisi pasar kerja;
 - f) Tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan perkapita.

2) Untuk penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK), di samping mempertimbangkan butir 1 di atas juga mempertimbangkan kemampuan perusahaan secara sektoral. (Abdul Khakim, 2006) terhadap perusahaan yang tidak mampu melaksanakan ketentuan Upah Minimum, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor. KEP-226/MEN/2000 juga mengaturnya di dalam Pasal 19 ayat (2) yang menentukan “Permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja/Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Propinsi. Permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum dimaksud di atas tidaklah serta merta dapat disetujui oleh Gubernur. Di dalam Pasal 20 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor. KEP-226/MEN/2000 dinyatakan bahwa “Berdasarkan permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum, Gubernur dapat meminta Akuntan Publik untuk memeriksa keadaan keuangan guna pembuktian ketidakmampuan perusahaan atas biaya perusahaan yang memohon penangguhan.” Selanjutnya Gubernur menetapkan penolakan atau persetujuan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum berdasarkan audit dari Akuntan Publik. Apabila permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum disetujui oleh Gubernur, maka persetujuan tersebut berlaku untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun. Atau dengan kata lain, bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum

dapat melakukan penangguhan yang tata caranya diatur dengan keputusan Menaker. Penangguhan pelaksanaan upah minimum bagi perusahaan yang tidak mampu dimaksudkan untuk membebaskan perusahaan yang bersangkutan melaksanakan upah minimum yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Bila penangguhan tersebut berakhir, maka perusahaan yang bersangkutan wajib melaksanakan upah minimum yang berlaku pada saat itu, tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan.

- 3) Pengertian Upah Minimum Propinsi/Kabupaten/Kota. Menurut pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.KEP-226/MEN/2000 tentang perubahan pasal 1, pasal 3, pasal 4, pasal 8, pasal 11, pasal 20, pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja PER-01/MEN/1999 tentang upah minimum, upah minimum propinsi adalah upah yang berlaku untuk seluruh kabupaten atau kota di satu propinsi. Besarnya upah minimum untuk setiap wilayah propinsi atau kabupaten atau kota tidak sama karena tergantung nilai kebutuhan hidup minimum (KHM) di daerah bersangkutan.

Tabel 1

UMR Jawa Timur

No.	Kabupaten/Kota	Upah Minimum
1.	UMK Kota Surabaya	Rp 4.300.479,19
2.	UMK Kabupaten Gresik	Rp 4.297.030,51
3.	UMK Kabupaten Sidoarjo	Rp 4.293.581,85
4.	UMK Kabupaten Pasuruan	Rp 4.290.133,19
5.	UMK Kabupaten Mojokerto	Rp 4.279.787,17
6.	UMK Kabupaten Malang	Rp 3.068.275,36
7.	UMK Kota Malang	Rp 2.970.502,73
8.	UMK Kota Batu	Rp 2.819.801,59
9.	UMK Kabupaten Jombang	Rp 2.654.095,88
10.	UMK Kabupaten Tuban	Rp 2.532.234,77
11.	UMK Kota Pasuruan	Rp 2.819.801,59
12.	UMK Kabupaten Probolinggo	Rp 2.553.265,95
13.	UMK Kabupaten Jember	Rp 2.355.662,91
14.	UMK Kota Mojokerto	Rp 2.481.302,97
15.	UMK Kota Probolinggo	Rp 2.350.000,00
16.	UMK Kabupaten Banyuwangi	Rp 2.314.278,87
17.	UMK Kabupaten Lamongan	Rp 2.488.724,77
18.	UMK Kota Kediri	Rp 2.085.924,76
19.	UMK Kabupaten Bojonegoro	Rp 2.066.781,80
20.	UMK Kabupaten Lumajang	Rp 1.982.295,10
21.	UMK Kabupaten Tulungagung	Rp 2.010.000,00
22.	UMK Kabupaten Bondowoso	Rp 1.954.705,75
23.	UMK Kabupaten Bangkalan	Rp 1.954.705,75
24.	UMK Kabupaten Nganjuk	Rp 1.954.705,75
25.	UMK Kabupaten Lamongan	Rp 2.488.724,77
26.	UMK Kota Kediri	Rp 2.085.924,76
27.	UMK Kabupaten Kediri	Rp 2.033.504,99
28.	UMK Kota Blitar	Rp 2.004.705,75
29.	UMK Kabupaten Sumenep	Rp 1.954.705,75
30.	UMK Kota Madiun	Rp 1.954.705,75
31.	UMK Kabupaten Blitar	Rp 2.004.705,75
32.	UMK Kabupaten Sampang	Rp 1.913.321,73
33.	UMK Kabupaten Situbondo	Rp 1.938.321,73
34.	UMK Kabupaten Pamekasan	Rp 1.938.321,73
35.	UMK Kabupaten Madiun	Rp 1.951.588,16
36.	UMK Kabupaten Ngawi	Rp 1.960.510,00
37.	UMK Kabupaten Ponorogo	Rp 1.938.321,73
38.	UMK Kabupaten Pacitan	Rp 1.961.154,77
39.	UMK Kabupaten Trenggalek	Rp 1.938.321,73

40.	UMK Kabupaten Magetan	Rp 1.938.321,73
-----	-----------------------	-----------------

Sumber: <http://money.kompas.com/read/2021/04/03/110300526/rincian-umr-surabaya-2021-dan-37-daerah-lain-di-jawa-timur>, diakses 24 Mei 2021, jam. 22.00 wib.

4. Tingkat Pengangguran

1. Teori Pengangguran

Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya (Sukirno, 2016). Seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai penganggur. Pengangguran dapat terjadi disebabkan oleh tidakseimbangan pada pasar tenaga kerja. Hal ini menunjukkan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2013) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Pengangguran merupakan masalah makro ekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan yang paling berat. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis. Jadi tidaklah mengejutkan jika pengangguran menjadi topik yang sering dibicarakan dalam perdebatan politik dan para politisi sering mengklaim bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu menciptakan lapangan kerja (Mankiw, 2003)

Tetapi secara aktif mencari pekerjaan tidak dapat digolongkan sebagai penganggur. Penganggur adalah orang yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja

kurang dari dua hari selama seminggu sebelum pencacahan dan berusaha memperoleh pekerjaan.

Selain itu pengangguran diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja yang ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum memperolehnya (Sukirno, 2016). Dalam standar pengertian yang sudah ditentukan secara internasional, yang dimaksudkan pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya (Sukirno, 2016). Pengangguran menunjukkan sumber daya yang terbuang. Para pengangguran memiliki potensi untuk memberikan kontribusi pada pendapatan nasional, tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Pencarian pekerjaan yang cocok dengan keahlian mereka adalah menggembirakan jika pencarian itu berakhir, dan orang-orang yang menunggu pekerjaan di perusahaan yang membayar upah di atas keseimbangan merasa senang ketika lowongan terbuka. (Sukirno, 2016).

Angkatan kerja meliputi populasi dewasa yang sedang bekerja atau sedang mencari kerja. Angkatan kerja terdiri dari golongan yang bekerja dan golongan yang menganggur. Golongan yang bekerja merupakan sebagian masyarakat yang sudah aktif dalam kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan sebagian masyarakat lainnya yang tergolong siap bekerja dan mencari pekerjaan termasuk dalam golongan menganggur. Golongan penduduk yang tergolong sebagai angkatan kerja adalah penduduk yang berumur di antara 15 sampai 64 tahun. Bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja ataupun mencari pekerjaan, atau bisa dikatakan sebagai bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya

tidak terlibat atau tidak berusaha terlibat dalam kegiatan produksi (Sukirno, 2013:126).

Kelompok bukan angkatan kerja ini terdiri atas golongan yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga, dan golongan lain yang menerima pendapatan. Jika dalam standar pengertian yang sudah ditentukan secara internasional, yang dimaksudkan pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang sedang aktif dalam mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Maka menurut sebab terjadinya, pengangguran menurut Sukirno (2016) digolongkan kepada tiga jenis yaitu:

- a. Pengangguran friksional Pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja yang ada. Kesulitan temporer ini dapat berbentuk sekedar waktu yang diperlukan selama prosedur pelamaran dan seleksi, atau terjadi karena faktor jarak atau kurangnya informasi. Pengangguran friksional tidak bisa dielakkan dari perekonomian yang sedang berubah. Untuk beberapa alasan, jenis-jenis barang yang dikonsumsi perusahaan dan rumah tangga bervariasi sepanjang waktu. Ketika permintaan terhadap barang bergeser, begitu pula permintaan terhadap tenaga kerja yang memproduksi barang-barang tersebut.

- b. Pengangguran struktural Pengangguran struktural terjadi karena ada problema dalam struktur atau komposisi perekonomian. Perubahan struktur yang demikian memerlukan perubahan dalam ketrampilan tenaga kerja yang dibutuhkan sedangkan pihak pencari kerja tidak mampu menyesuaikan diri dengan ketrampilan baru tersebut.
- c. Pengangguran konjungtur. Pengangguran konjungtur terjadi karena kelebihan pengangguran alamiah dan berlaku sebagai akibat pengangguran dalam permintaan agregat.

Sukirno (2016), mengklasifikasikan pengangguran berdasarkan cirinya, dibagi menjadi empat kelompok:

a. Pengangguran Terbuka

Pengangguran ini adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal dan sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah daripada pertambahan tenaga kerja. Efek dari keadaan ini di dalam suatu jangka masa yang cukup panjang mereka tidak melakukan suatu pekerjaan. Jadi mereka menganggur secara nyata dan separuh waktu, dan oleh karena dinamakan pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka dapat pula wujud sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan suatu industri.

b. Pengangguran Tersembunyi

Pengangguran ini adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Salah satunya adalah karena kecilnya perusahaan dengan tenaga kerja yang terlalu banyak sehingga untuk menjalankan kegiatannya tidak efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi.

c. Setengah Menganggur

Pengangguran ini adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu. Mereka mungkin hanya bekerja satu hingga dua hari dalam seminggu, atau satu hingga empat jam sehari. Pekerja-pekerja yang mempunyai masa kerja seperti ini digolongkan sebagai setengah menganggur.

d. Pengangguran Bermusim

Pengangguran ini adalah tenaga kerja yang tidak bekerja karena terikat pada musim tertentu. Pengangguran seperti ini terutama di sektor pertanian dan perikanan. Pada umumnya petani tidak begitu aktif di antara waktu sesudah menanam dan panen. Apabial dalam masa tersebut mereka tidak melakukan pekerjaan lain maka mereka terpaksa menganggur.

Dalam membicarakan mengenai pengangguran yang selalu diperhatikan bukanlah mengenai jumlah pengangguran, tetapi mengenai tingkat pengangguran yang dinyatakan sebagai persentasi dari angkatan kerja (Sukirno, 2016). Untuk melihat keterjangkauan pekerja (kesempatan bekerja), maka digunakan rumus Tingkat Pengangguran Terbuka. Definisi dari tingkat pengangguran terbuka ialah

persentase penduduk yang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dari sejumlah angkatan kerja yang ada (BPS, 2010)

Tingkat pengangguran terbuka memberikan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok penganggur. Tingkat pengangguran kerja diukur sebagai persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Untuk mengukur tingkat pengangguran terbuka pada suatu wilayah bisa didapat dari prosentase membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja dan dinyatakan dalam persen.

$$TPT = \frac{\text{jumlah pengangguran}}{\text{jumlah angkatan kerja}} \times 100$$

Pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang betul-betul tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran ini terjadi ada yang karena belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal dan ada juga yang karena malas mencari pekerjaan atau malas bekerja. (Dharmayanti, 2011).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah angka yang menunjukkan banyaknya pengangguran terhadap 100 penduduk yang masuk kategori angkatan kerja. Pengangguran terbuka (*open unemployment*) didasarkan pada konsep seluruh angkatan kerja yang mencari pekerjaan, baik yang mencari pekerjaan pertama kali maupun yang sedang bekerja sebelumnya. Sederhana pekerja yang digolongkan setengah pengangguran (*underemployment*) adalah pekerja yang masih mencari pekerjaan penuh atau sambilan dan mereka yang bekerja dengan jam kerja rendah (di bawah sepertiga jam kerja normal, atau berarti bekerja kurang dari 35 jam dalam

seminggu). Namun masih mau menerima pekerjaan, serta mereka yang tidak mencari pekerjaan namun mau menerima pekerjaan itu. Pekerja digolongkan setengah pengangguran parah (*severely underemployment*) bila ia termasuk setengah menganggur dengan jam kerja kurang dari 25 jam seminggu.

Menurut BPS (2010), Pengangguran terbuka terdiri atas:

- a. Penduduk yang sedang mencari pekerjaan
- b. Penduduk yang sedang mempersiapkan usaha
- c. Penduduk yang merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan
- d. Penduduk yang sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja.

Pengangguran terbuka biasanya terjadi pada geerasi muda yang baru menyelesaikan pendidikan menengah dan tinggi. Ada kecenderung mereka yang baru menyelesaikan pendidikan berusaha mencari kerja sesuai dengan aspirasi mereka. Aspirasi mereka biasanya adalah bekerja disektor modern atau di kantor. Untuk mendapatkan pekerjaan itu mereka bersedia menunggu untuk beberapa lama. Tidak tertutup kemungkinan mereka berusaha mencari pekerjaan itu di kota atau di provinsi atau daerah yang kegiatan industry telah berkembang. Ini yang menyebabkan angka pengangguran terbuka cenderung tinggi di kota atau daerah yang kegiatan industry atau sektor modern telah berkembang (Kuncoro, 2006).

Sebaliknya angka pengangguran terbuka rendah di daerah atau provinsi yang kegiatan ekonomi masih bertumpu pada sektor pertanian. Apalagi tingkat pendidikan di daerah tersebut rendah. Pada umumnya, mereka yang berpendidikan rendah bersedia bekerja apa saja untuk menopang kehidupan. Bila sektor pertanian kurang dapat menjamin kelangsungan hidup, mereka bersedia berusaha di kantor

informal. Mereka tidak memperdulikan apakah jam kerja panjang atau penghasilan rendah. Bagi mereka yang penting dapat bertahan hidup.

Beberapa akibat buruk dari pengangguran dibedakan kepada dua aspek dimana dua aspek tersebut yaitu: (Sukirno, 2016)

a. Akibat buruk ke atas kegiatan perekonomian

Tingkat pengangguran yang relatif tinggi tidak memungkinkan masyarakat mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh. Hal ini dapat dengan jelas dilihat dari memperlihatkan berbagai akibat buruk yang bersifat ekonomi yang ditimbulkan oleh masalah pengangguran. Akibat-akibat buruk tersebut dapat dibedakan sebagai berikut :

- 1) Pengangguran menyebabkan masyarakat tidak memaksimumkan tingkat kemakmuran yang mungkin dicapainya. Hal ini terjadi karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional riil (nyata) yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensial (pendapatan yang seharusnya). Oleh karena itu, kemakmuran yang dicapai oleh masyarakat pun akan lebih rendah.
- 2) Pengangguran menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang. Pengangguran diakibatkan oleh tingkat kegiatan ekonomi yang rendah, dan dalam kegiatan ekonomi yang rendah pendapatan pajak pemerintah semakin sedikit. Jika penerimaan pajak rendah, dana untuk kegiatan ekonomi pemerintah juga akan berkurang sehingga kegiatan pembangunan pun akan terus menurun.
- 3) Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Pengangguran menimbulkan dua akibat buruk kepada kegiatan sektor swasta. Yang pertama,

pengangguran tenaga buruh diikuti pula oleh kelebihan kapasitas mesin-mesin perusahaan. Kedua, pengangguran yang diakibatkan keuntungan kelesuan berkurang. Kegiatan Keuntungan perusahaan yang rendah menyebabkan mengurangi keinginan untuk melakukan investasi.

b. Akibat buruk ke atas individu dan masyarakat

Pengangguran akan mempengaruhi kehidupan individu dan kestabilan sosial dalam masyarakat. Beberapa keburukan sosial yang diakibatkan oleh pengangguran adalah:

- 1) Pengangguran menyebabkan kehilangan mata pencarian dan pendapatan.
- 2) Pengangguran dapat menyebabkan kehilangan keterampilan.

Keterampilan dalam mengerjakan suatu pekerjaan hanya dapat dipertahankan apabila keterampilan tersebut digunakan dalam praktek.

- 3) Pengangguran dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik.

Kegiatan ekonomi yang lesu dan pengangguran yang tinggi dapat menimbulkan rasa tidak puas masyarakat kepada pemerintah.

B. Penelitian Terdahulu

Hasil dari beberapa peneliti terdahulu yang digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini, antara lain adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Yulia Pangastuti (2015)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi	Metode pengumpulan data yang digunakan	Hasil penelitian menunjukan pengaruh PDRB terhadap

		Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Tengah	dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, sehingga tidak diperlukan teknik sampling serta kuesioner. Analisis kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan Metode Random Effect (REM).	penyerapan tenaga kerja memiliki hubungan yang negatif sebesar 0.000504. Pengaruh UMK terhadap penyerapan tenaga kerja memiliki pengaruh positif dengan besarnya koefisien 0.06523. Pengaruh pengangguran terhadap penyerapan tenaga kerja memiliki pengaruh positif dengan besarnya koefisien 2.480002. Pengaruh PAD terhadap penyerapan tenaga kerja memiliki hubungan positif dengan besarnya koefisien 0.000170. Nilai probabilitas masing masing variabel yang tidak signifikan yaitu PDRB, Upah
--	--	--	---	--

				Minimum Kabupaten/Kota (UMP), serta Pendapatan Asli Daerah. Variabel yang signifikan yaitu Pengangguran karena nilai probabilitas < dari alpha. Sehingga perlu dikajinya faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah antara lain jumlah perusahaan, nilai produksi, suku bunga dan lain sebagainya.
2.	Mimi Hardini (2017)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesempatan Kerja Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Sidoarjo	Obyek penelitian: Kabupaten Sidoarjo Jenis penelitian: kuantitatif Teknik analisa: regresi linier berganda	Hasil penelitian menunjukkan: 1. Kedua variabel yaitu pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja ada pengaruh terhadap tingkat pengangguran.

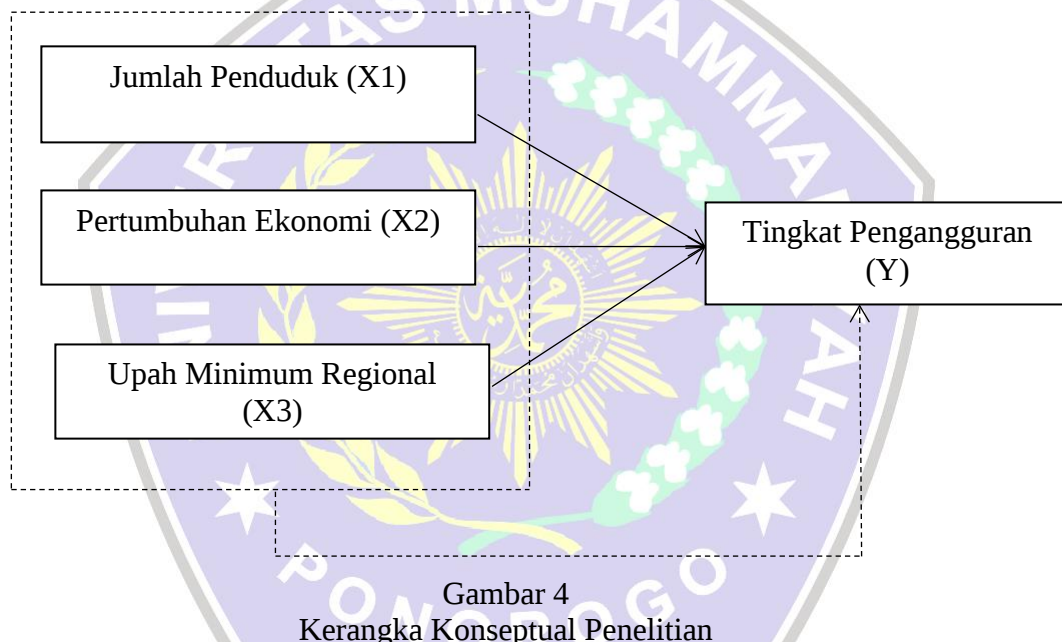
				2. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat pengangguran. 3. Kesempatan kerja ada pengaruh terhadap tingkat pengangguran.
3.	Imam Buchari (2016)	Pengaruh Upah Minimum Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Manufaktur Di Pulau Sumatera Tahun 2012-2015	Metode penelitian yang digunakan Time Series dari 2012-2015 yang terdiri dari 10 provinsi di Pulau Sumatera, dengan metode ex post facto. Data yang disajikan setiap tahun yang diperoleh dari BPS (Biro Pusat Statistik) dan Departemen Tenaga Kerja. Penelitian ini menggunakan model regresi	Berdasarkan hasil analisis secara simultan, upah minimum dan tingkat pendidikan secara signifikan mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja pada Industri manufaktur di Pulau Sumatera. Berdasarkan hasil analisis upah minimum memiliki koefisien negatif tapi upah minimum tidak memberikan dampak secara parsial dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. tingkat

			data panel efek tetap.	pendidikan pemberian dampak signifikan positif pada Penyerapan Tenaga Kerja
4.	M. Amirul Muminin dan Wahyu Hidayat R. (2017)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015	Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan regresi data panel.	Hasil penelitian ini menunjukkan : 1) Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka dimana jika Pertumbuhan Ekonomi naik 1% maka Tingkat Pengangguran Terbuka turun sebesar - 0.282, 2) Jumlah Penduduk berpengaruh secara Positif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka. hal ini menandakan bahwa setiap terjadi kenaikan Jumlah Penduduk sebesar 1% maka Tingkat

				Pengangguran Terbuka juga akan naik sebesar 0.001. Koefisien Determinan (R^2) sebesar 0.967435 atau 96,7453%. hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel bebas yaitu Pertumbuhan Ekonomi (X_1), Jumlah Penduduk (X_2), dalam menjelaskan variabel terikat yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (Y) sebesar 0.967435 atau 96,7453%, sedangkan sisanya 3,2565% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.
5.	Dewi Indriani (2019)	Pengaruh Upah Minimum Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat	Obyek penelitian: Provinsi Lampung Jenis penelitian: kuantitatif	Secara keseluruhan hasil penelitian menunjukan bahwa upah minimum dan jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap

		Pengangguran Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam	Teknik analisa: regresi linier berganda	tingkat pengang- guran di provinsi Lampung. karena ketika upah naik maka output yang dikeluarkan juga naik maka perusahaan akan menambah tenagakerja.
--	--	--	---	--

C. Kerangka Berpikir



Keterangan:

—————> = Secara parsial

-----> = Secara bersama-sama

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten/Kota wilayah Bakorwil 1 Madiun.

D. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah antara lain :

1. Pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten/ Kota wilayah Bakorwil 1 Madiun.

Jumlah penduduk yang padat akan mempengaruhi tingkat pengangguran karena dengan meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk, maka jumlah tenaga kerja dan angkatan kerja juga ikut meningkat. Angkatan kerja membutuhkan lapangan pekerjaan dan umumnya di Negara berkembang laju pertumbuhan penduduk (termasuk angkatan kerja) lebih besar daripada laju pertumbuhan lapangan kerja.

Penelitian ini didukung oleh M. Amirul Muminin dan Wahyu Hidayat R. (2017) tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015. Hasil penelitian menunjukkan Jumlah Penduduk berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka. Hal ini menandakan bahwa setiap terjadi kenaikan Jumlah Penduduk sebesar 1% maka Tingkat Pengangguran Terbuka juga akan naik sebesar 0.001.

Dari uraian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_{01} = tidak terdapat pengaruh Jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran di kabupaten/Kota Wilayah Bakorwil 1 Madiun.

H_{a1} = Ada pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten/Kota wilayah Bakorwil 1 Madiun.

2. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten/Kota wilayah Bakorwil 1 Madiun.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian. Kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan output

nasional. Adanya perubahan output dalam perekonomian merupakan analisis ekonomi jangka pendek

Penelitian yang dilakukan oleh Mimi Hardini (2017) tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesempatan Kerja Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo tergolong tinggi. Secara signifikan berpengaruh terhadap penyerapan kesempatan kerja. Sementara itu Pertumbuhan Ekonomi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Pengangguran.

Dari uraian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_0 2= Tidak terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten/Kota Wilayah Bakorwil 1 Madiun.

H_a 2= Ada pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten/Kota wilayah Bakorwil 1 Madiun.

3. Pengaruh upah minimum regional terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten/Kota wilayah Bakorwil 1 Madiun.

Menurut pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum, upah minimum adalah Upah Bulanan Terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menentukan bahwa Pemerintah dalam hal ini Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Propinsi dan/atau bupati/walikota, menetapkan upah minimum berdasarkan KHL dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Imam Buchari (2016) hasil analisis secara simultan, upah minimum dan tingkat pendidikan secara signifikan mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja pada Industri manufaktur di Pulau Sumatera.

Dari uraian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

$H_0 3$ = Tidak terdapat pengaruh Upah Minimum Regional terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten/Kota wilayah Bakorwil 1 Madiun.

$H_a 3$ = Ada pengaruh upah minimum regional terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten/Kota wilayah Bakorwil 1 Madiun.

4. Pengaruh jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan upah minimum regional terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten/Kota wilayah Bakorwil 1 Madiun.

Pengangguran menunjukkan sumber daya yang terbuang. Para pengangguran memiliki potensi untuk memberikan kontribusi pada pendapatan nasional, tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Pencarian pekerjaan yang cocok dengan keahlian mereka adalah menggembirakan jika pencarian itu berakhir, dan orang-orang yang menunggu pekerjaan di perusahaan yang membayar upah di atas keseimbangan merasa senang ketika lowongan terbuka.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Indriani (2019) menunjukkan secara keseluruhan hasil penelitian menunjukkan bahwa upah minimum dan jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di provinsi Lampung. dikarenakan ketika upah naik maka output yang dikeluarkan juga naik maka perusahaan akan menambah tenaga kerja.

$H_0 4$ = Tidak terdapat pengaruh Jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan Upah Minimum Regional terhadap tingkat Pengangguran di Kabupaten/Kota wilayah Bakorwil 1 Madiun.

$H_a 4$ = Ada pengaruh jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan upah minimum regional terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten/Kota wilayah Bakorwil 1 Madiun.